



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

FLASH REPORT

REVIU PELAKSANA ANGGARAN (RPA) TRIWULAN III TAHUN 2019



**AULIA RAHIM
NUGROHO ADI WIBOWO
HARSYA SAPUTRA
RESTY FAMELIA LARISHA**

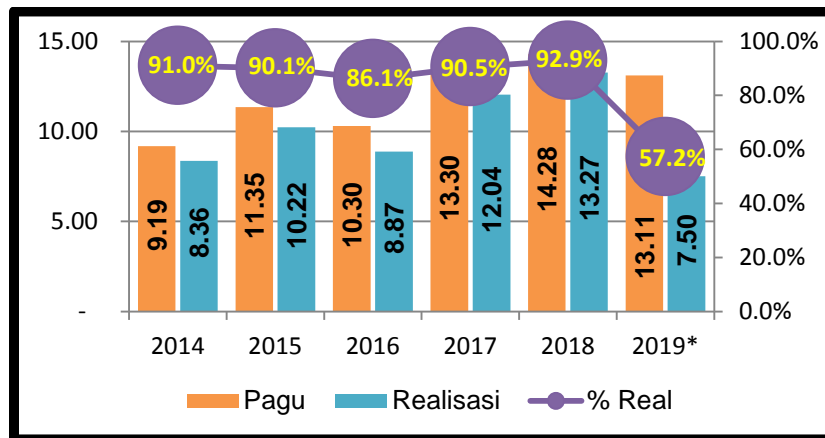
**KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

FLASH REPORT RPA TRIWULAN III TAHUN 2019
KANWIL DJPUB PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Pagu Dan Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2019

Alokasi Belanja Pemerintah Pusat pada APBN Tahun 2019 di Sumatera Barat sebesar Rp13,1 triliun mengalami kenaikan sebesar 78% dibandingkan alokasi lima tahun terakhir. Apabila dibandingkan alokasi anggaran tahun 2018, alokasi Belanja Pemerintah di Sumatera Barat mengalami kenaikan sebesar 16%. Kenaikan alokasi anggaran terbesar terdapat pada ini antara lain disebabkan adanya penambahan alokasi belanja untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Pertahanan.

Grafik 1
 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran di Sumatera Barat
 Tahun 2014 – 2019 (triliun rupiah)



Pada Kementerian PUPR alokasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp3,78 triliun, naik sebesar Rp1,27 triliun atau 51% dibandingkan Tahun 2018. Kenaikan alokasi anggaran pada Kementerian PUPR terbesar terdapat pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Barat (631112) yang digunakan antara lain untuk pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi (Rp192,3 miliar), Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Agam, Kab Padang Pariaman dan Kab Pesisir Selatan (Rp72,1 miliar), dan Rehabilitasi dan Renovasi Sarpras Madrasah Kab Lima Puluh Kota, Kab, Tanah Datar, Solok Selatan, Kota Solok & Sawah Lunto (Rp72,6 miliar). Satker dengan kenaikan alokasi terbesar kedua adalah Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat (498580) sebesar Rp206,9 miliar yang digunakan antara lain untuk rehabilitasi jalan Batas Kota Solok - Batas Kota

Sawahlunto (Rp255,5 miliar), pelebaran jalan Tapan - Batas Prov. Bengkulu sepanjang 10Km (Rp174,1 miliar), pembangunan jalan Lingkar Solok sepanjang 5 Km (Rp44,8 miliar), dan pembangunan jembatan Pulai sepanjang 137 m (Rp49 miliar). Sedangkan Kementerian Pertahanan mendapatkan kenaikan alokasi anggaran terbesar kedua, yaitu sebesar Rp164,3 miliar. Kenaikan terbesar terdapat pada satker Korem-032/WBR DAM-I/BB (685571) yang digunakan antara lain untuk pembelian belanja barang operasional lainnya dalam rangka evaluasi pelaksanaan program, kenaikan alokasi tunjangan kinerja, serta penambahan alokasi tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI.

Dari sisi realisasi anggaran, pada Triwulan III Tahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp7,5 triliun atau 57,2%, atau belum mencapai target penyerapan Triwulan III, yaitu 60%. Realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi Triwulan III pada lima tahun terakhir (55,3%) masih lebih tinggi namun masih lebih rendah dibandingkan realisasi Triwulan III Tahun 2018 yang sebesar 58,1%. Masih belum tercapainya target penyerapan anggaran Triwulan III Tahun 2019 antara lain disebabkan rendahnya realisasi anggaran pada Kementerian PUPR dan Kementerian Agama. Pada Kementerian PUPR, realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2019 baru mencapai 38,6% atau Rp1,45 triliun, sedangkan pada Kementerian Agama, tingginya alokasi anggaran yang belum terserap disamping merupakan kontribusi dari akumulasi 256 satuan kerja, terdapat satuan kerja penyumbang rendahnya realisasi anggaran yaitu UIN Imam Bonjol Padang, khususnya pada pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan dari alokasi Rp70,2 miliar baru terealisasi sebesar 0,12%.

a. Belanja Pegawai

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 alokasi Belanja Pegawai pada APBN Tahun 2019 di Sumatera Barat sebesar Rp4,2 triliun yang sebagian besar dialokasikan pada Kementerian Agama (29,7%) dan Kepolisian RI (16,5%). Alokasi belanja pegawai pada Kementerian Agama sebesar Rp1,25 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk Gaji dan Tunjangan Melekat pada gaji (termasuk gaji guru madrasah) sebesar Rp487,8 miliar, Tunjangan Profesi Guru Rp384,4 miliar, dan Tunjangan Kinerja Rp157,6 miliar. Sedangkan pada Kepolisian RI dari alokasi belanja pegawai sebesar Rp696,5 miliar sebagian besar dialokasikan untuk Gaji anggota Polri dan Tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp654 miliar.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 sebesar 77%, lebih tinggi dibandingkan realisasi Triwulan III Tahun 2018 (71,02%). Hal ini antara lain

disebabkan pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 yang memasukkan komponen Tunjangan Kinerja.

Tabel 1

Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2018-2019 (miliar Rupiah)

JB	2018			2019			BLOKIR
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	
51	4,171.01	2,962.10	71.02%	4,201.17	3,235.30	77.01%	0.01
52	4,656.45	2,473.95	53.13%	5,618.17	3,078.44	54.79%	0.2
53	2,895.61	1,122.55	38.77%	3,263.88	1,171.94	35.91%	16.96
57	22.50	11.75	52.21%	58.59	15.73	61.45%	0
Total	11,745.57	6,570.36	55.94%	13,108.82	7,501.41	57.22%	17.2

b. Belanja Barang

Alokasi Belanja Barang s.d. Triwulan III Tahun 2019 sebesar Rp5.61 triliun, sebagian besar dialokasikan pada Kementerian PUPR sebesar Rp1,3 triliun dan Kementerian Ristekdikti sebesar Rp639,2 miliar. Belanja Barang pada Kementerian PUPR sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan ke masyarakat, antara lain pembangunan jalan Trans Siberut sepanjang 29 Km (Rp67,2 miliar), pelebaran jalan Abai – Sungai Dareh sepanjang 8 Km (Rp48,8 miliar), dan pembangunan jalan Lingkar Solok sepanjang 5 Km (Rp44,8 miliar), dan pembangunan jembatan Pulaui sepanjang 137 m (Rp49 miliar). Pada Kementerian Ristekdikti alokasi belanja barang terbesar untuk alokasi belanja gaji dan tunjangan pegawai BLU (Rp168 miliar) serta belanja barang dan jasa BLU lainnya (Rp102,5 miliar).

Realisasi Belanja Barang s.d. Triwulan III Tahun 2019 sebesar 54,8% atau sedikit lebih tinggi dibanding Triwulan III Tahun 2018 yaitu sebesar 53,1%. Realisasi Belanja Barang masih di bawah target nasional (60%) antara lain disebabkan rendahnya realisasi Belanja Barang pada Kementerian PUPR yang baru mencapai 38,8%, khususnya pada satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Barat (631112) pada pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Agam, Kab Padang Pariaman dan Kab Pesisir Selatan, dan Rehabilitasi dan Renovasi Sarpras Madrasah Kab Lima Puluh Kota, Kab, Tanah Datar, Solok Selatan, Kota Solok & Sawah Lunto.

c. Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal s.d. Triwulan III Tahun 2019 sebesar Rp3.26 triliun, sebagian besar dialokasikan pada Kementerian PUPR sebesar Rp2,3 triliun. Belanja Modal pada Kementerian PUPR antara lain dialokasikan pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat (498580) untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Tanah Badantung - Kiliranjao Rp330 miliar dan satuan kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Indragiri-Akuaman, WS Kampar, WS Rokan Provinsi Sumatera Barat (498039) untuk pekerjaan Pembangunan Daerah Irigasi Batang Bayang (6.500 Ha) di Kab. Pasaman Barat sebesar Rp322,7 miliar.

Realisasi Belanja Modal s.d. Triwulan III Tahun 2019 sebesar 35,9% lebih rendah dibandingkan Triwulan III Tahun 2019 yang sebesar 38,7%. Rendahnya realisasi Belanja Modal disebabkan masih belum terealisasinya sebagian besar Belanja Modal pada Kementerian PUPR yang memiliki alokasi Belanja Modal terbesar.

d. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial s.d. Triwulan III Tahun 2019 sebesar Rp25,6 miliar yang dialokasikan pada Kementerian Agama Rp19,1 miliar dan Kementerian Sosial sebesar Rp6,5 miliar. Alokasi Belanja Bansos pada Kementerian Agama digunakan untuk bantuan Bidik Misi On Going dan bantuan untuk santri PPS penerima PIP. Sedangkan pada Kementerian Sosial digunakan antara lain untuk bantuan dalam bentuk barang untuk Komunitas Adat Terpencil dan bantuan dalam bentuk uang untuk Bantuan Ekonomi Produktif.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial s.d. Triwulan III Tahun 2019 sebesar 61,4% atau lebih tinggi dibandingkan realisasi Triwulan III Tahun 2018 sebesar 52,2%.

2. Blokir Anggaran

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2019, masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp17,22 miliar. Apabila dibandingkan dengan jumlah blokir pada bulan Januari tahun 2019 yang sebesar Rp141,02 miliar, terdapat Rp123,8 blikir anggaran yang telah dibuka yang sebagian besar disebabkan telah dilengkapinya data dukung terhadap kegiatan-kegiatan yang dibatasi.

Dari jumlah blokir sebesar Rp17.22 miliar, sebagian besar terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp4.52 miliar. Satuan kerja dengan blokir terbesar adalah SNVT Jaringan pemanfaatan Air WS Indragiri-Akuaman, WS Kampar, WS Rokan Provinsi Sumatera Barat

sebesar Rp4,27 miliar untuk belanja modal irigasi pada Pembangunan Di. Batang Bayang (6.500 Ha) Di Kab. Pasaman Barat.

3. Tracking Kontributor Undisbursed

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, realisasi anggaran s.d. Triwulan III Tahun 2019 sebesar 57,2% atau masih terdapat alokasi anggaran yang belum terserap sebesar Rp5,6 triliun. Kementerian Negara/ Lembaga yang berkontribusi terbesar terhadap ketidakserapan anggaran adalah :

a. **Kementerian PUPR** berkontribusi 41,32% terhadap ketidakserapan anggaran atau terdapat Rp2,3 triliun alokasi anggaran yang belum terserap. Alokasi anggaran yang tidak terserap sebagian besar terdapat pada Jenis Belanja Modal (Rp1,03 triliun). Beberapa satker pada Kementerian PUPR dengan kontribusi ketidakserapan tertinggi adalah :

- 1) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat (498580) dengan jumlah anggaran belum terserap sebesar Rp565,9 miliar sebagian besar pada Belanja Modal untuk pekerjaan pelebaran jalan Tapan - Batas Prov. Bengkulu baru terealisasi 13,8% dari alokasi sebesar Rp174,1 miliar dan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Tanah Badantung - Kiliranjao dengan realisasi sebesar 33,9% dari alokasi sebesar Rp330 miliar.
- 2) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Barat (631112) dengan jumlah anggaran belum terserap sebesar Rp542,5 miliar sebagian besar pada Belanja Barang untuk pekerjaan pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi (belum terserap Rp128,5 miliar), Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Agam, Kab Padang Pariaman dan Kab Pesisir Selatan (belum terserap Rp75 miliar), dan Rehabilitasi dan Renovasi Sarpras Madrasah Kab Lima Puluh Kota, Kab, Tanah Datar, Solok Selatan, Kota Solok & Sawah Lunto (belum terserap Rp72,5 miliar).

b. **Kementerian Agama** berkontribusi 12,9% terhadap ketidakserapan anggaran atau terdapat Rp728,1 miliar alokasi anggaran yang belum terserap. Alokasi anggaran yang tidak terserap merupakan akumulasi dari 256 satker yang sebagian besar terdapat pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Satuan kerja dengan kontribusi terbesar terhadap ketidakserapan anggaran pada Kementerian Agama antara lain :

- 1) UIN Imam Bonjol Padang (424050), pada pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan dari alokasi Rp70,2 miliar baru terealisasi sebesar 0,12%.

- 2) IAIN Bukittinggi (424075), pada Belanja Modal yaitu pembangunan gedung kuliah Rp25 miliar dan pekerjaan pengadaan meubelair sebesar Rp2,9 miliar.

Tabel 2

Kontribusi Terhadap Ketidakserapan Anggaran Triwulan III Tahun 2019
Menurut Kementerian/ Lembaga

Kementerian/ Lembaga	Pagu	Realisasi	Sisa Dana	% Undisbursed
033 Kemen. PUPR	3,776.4	1,459.4	2,317.0	41.32%
025 Kemen. Agama	1,965.1	1,237.0	728.1	12.99%
042 Kemen. Ristek Dikti	1,422.4	865.4	557.0	9.93%
024 Kemen. Kesehatan	863.7	524.9	338.8	6.04%
060 Kepolisian RI	1,171.6	929.4	242.2	4.32%
022 Kemen. Perhubungan	409.4	206.7	202.8	3.62%
012 Kemen. Pertahanan	569.4	393.9	175.5	3.13%
018 Kemen. Pertanian	313.3	140.4	172.9	3.08%
019 Kemen. Perindustrian	187.9	94.0	93.8	1.67%
115 Bawaslu	196.5	121.9	74.6	1.33%
056 Kemen. ATR/ BPN	167.8	94.3	73.5	1.31%
026 Kemen. Ketenagakerjaan	163.9	98.2	65.7	1.17%
005 Mahkamah Agung	203.8	140.6	63.2	1.13%
076 Komisi Pemilihan Umum	366.0	304.9	61.1	1.09%
023 Kemen. Dikbud	115.2	60.1	55.1	0.98%
054 Badan Pusat Statistik	122.5	87.1	35.4	0.63%
006 Kejaksaan RI	137.6	102.8	34.8	0.62%
068 B K K B N	94.4	61.8	32.6	0.58%
015 Kemen. Keuangan	110.3	77.8	32.5	0.58%
010 Kemen. Dalam Negeri	71.8	40.0	31.8	0.57%
- Kemen/ Lembaga Lainnya	679.8	460.6	219.2	3.91%
JUMLAH	13,108.8	7,501.4	5,607.4	100%

Disamping dua kementerian dengan kontribusi ketidakserapan anggaran terbesar, terdapat kementerian yang perlu mendapatkan perhatian dikarenakan tingkat realisasi anggaran yang masih rendah, yaitu :

- a. **Kementerian Perhubungan** berkontribusi 3,62% atau terdapat Rp202,8 miliar anggaran yang belum terserap, khususnya pada belanja barang. Satker dengan kontribusi terbesar terhadap ketidakserapan anggaran adalah :

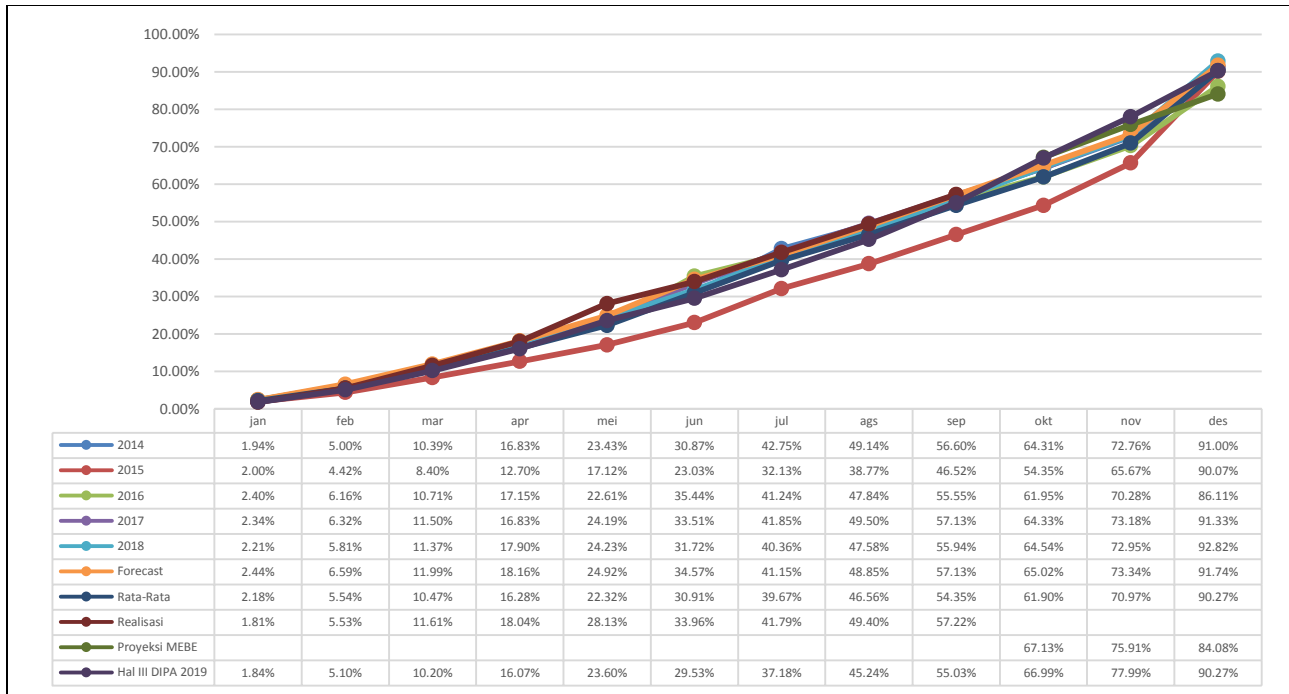
- 1) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat, pada pekerjaan Peningkatan dan Sterilisasi jalur KA di Km 0+000 s/d 2+950 Km'sp termasuk

- penataan spoor di Emplasemen Stasiun Padang sebesar Rp26,4 miliar dan Pembangunan Stasiun Pulau Aer dan Fasilitas Pendukung sebesar Rp7,5 miliar.
- 2) Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (419172), untuk honor mengajar dosen sebesar Rp48,8 miliar.
- b. **Kementerian Pertanian** berkontribusi 3,08% atau terdapat Rp172,9 miliar anggaran yang belum terserap, khususnya pada belanja barang. Satker dengan kontribusi terbesar terhadap ketidakserapan anggaran adalah :
- 1) Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mangatas, pada pekerjaan pengadaan ayam, pakan, dan obat-obatan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp40 miliar.

Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi, pada pekerjaan pengadaan ayam, bantuan pakan, dan obat-obatan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp20 miliar.

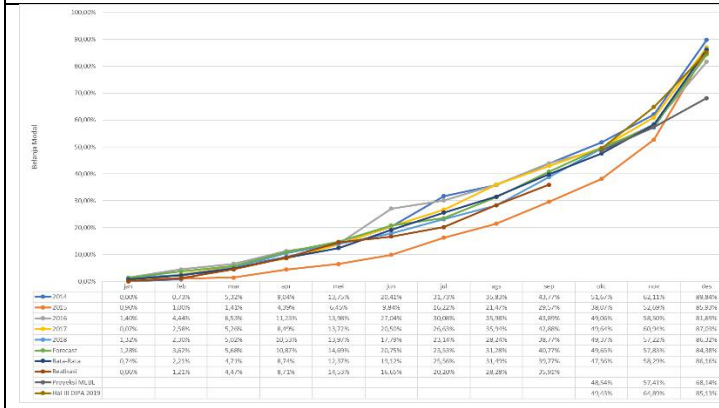
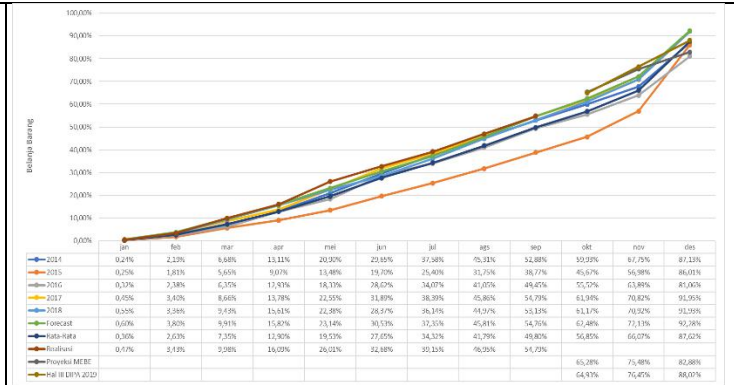
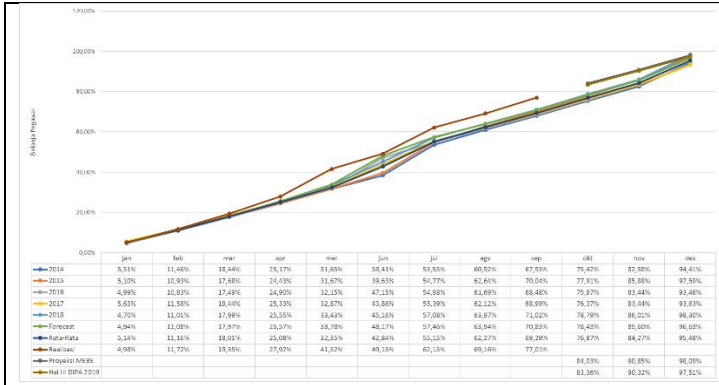
4. Proyeksi Triwulan IV Tahun 2019

Salah satu fungsi penyusunan Flash Report RPA Triwulan III Tahun 2019 adalah sebagai sarana Ditjen Perbendaharaan untuk mengambil kebijakan antisipasi akhir tahun anggaran 2019 dengan memotret permasalahan-permasalahan dan fenomena pelaksanaan anggaran di daerah. Untuk itu dilakukan analisis proyeksi penyerapan anggaran periode triwulan IV dengan menggunakan metode rata-rata, *forecast excel*, laporan RPD satker triwulan IV dan deviasi hal III DIPA. Data yang digunakan adalah realisasi penyerapan anggaran bulanan yang bersifat kumulatif periode tahun anggaran 2014-2019 (s.d September 2019).



Grafik diatas menggambarkan pergerakan realisasi dari tahun anggaran 2014-2019 serta proyeksi penyerapan anggaran triwulan IV. Berdasarkan pendekatan forecast, rata-rata, dan halaman III DIPA diperkirakan penyerapan anggaran pada triwulan IV bisa melebihi 90%. Sementara itu berdasarkan proyeksi RPD (Rencana Penarikan Dana) satker diperkirakan penyerapan hanya berkisar 84%. Perbedaan proyeksi disebabkan masih belum akuratnya rencana penarikan dana satker dan kemungkinan perubahan pagu DIPA oleh satker (penambahan atau pengurangan anggaran). Namun demikian tetap diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan agar target penyerapan sebesar 90% bisa tercapai.

Proyeksi penyerapan triwulan IV tidak hanya dilakukan secara keseluruhan, akan tetapi juga dirinci sesuai jenis belanja satker. Karena masing-masing jenis belanja mempunyai karakteristik yang berbeda dan diperlukan tindakan dan aturan yang berbeda untuk mengantisipasi permasalahan masing-masing jenis belanja tersebut



a. Belanja Pegawai

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada beberapa pendekatan proyeksi yang digunakan dimana diperkirakan pada triwulan IV penyerapan anggaran melebihi 95%. Tren penyerapan belanja pegawai cenderung stabil setiap bulannya dan hanya meningkat pada periode bulan Mei-Juli dikarenakan pencairan gaji 13 dan THR.

b. Belanja Barang

Proyeksi penyerapan belanja barang triwulan IV diperkirakan tidak mencapai 90 %. Namun demikian tidak menutup kemungkinan proyeksi tersebut bisa berubah mengingat kemungkinan meningkatnya volume pencairan pada triwulan IV, terutama bulan November dan Desember. Selanjutnya pagu belanja barang bisa saja bergeser sebagai tindak lanjut potensi pagu minus belanja pegawai.

c. Belanja Modal

Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 penyerapan belanja modal tidak pernah mencapai target 90%, dengan demikian proyeksi TW IV juga tidak jauh berbeda dan diperkirakan realisasi belanja modal hanya berkisar 84%-86%. Berdasarkan proyeksi RPD satker diperkirakan penyerapan jauh lebih rendah, yakni hanya sebesar 68,14%.

Rendahnya angka RPD satker dimungkinkan karena masih belum akuratnya satker menyusun RPD akhir tahun dan masih terdapat kemungkinan penambahan atau pengurangan pagu belanja modal (Revisi DJA).

d. Belanja Bansos

Belanja bantuan sosial mempunyai karakteristik yang spesifik karena diikat oleh juknis oleh masing-masing kementerian, terutama Kementerian Sosial. Tren penyerapan belanja modal dari awal tahun sangat rendah dan meningkat tajam pada triwulan III dan triwulan IV. Hanya proyeksi RPD dan halaman III DIPA yang memperkirakan penyerapan bansos tidak mencapai target. Hal tersebut dikarenakan masih belum akuratnya RPD yang disusun satker-satker pengelola belanja bansos dan masih belum *update* nya satker-satker tersebut menyusun halaman III DIPA nya.

No	BA	Pagu	Realisasi	Oktober	Nopember	Desember	Perkiraan Sisa Pagu	Perkiraan Realisasi s.d Desember
1	'033	3.712.918.762.000,00	1.168.435.981.628,00	526.107.062.766,00	384.487.368.403,00	348.142.231.401,00	1.285.746.117.802,00	65,37%
2	'025	1.961.593.347.000,00	1.089.963.460.754,00	167.049.972.316,00	158.805.466.872,00	158.157.216.127,00	387.617.230.931,00	80,24%
3	'042	1.397.859.435.000,00	764.023.451.296,00	122.617.465.289,00	123.229.385.949,00	100.981.737.668,00	287.007.394.798,00	79,47%
4	'060	1.171.624.031.000,00	836.170.584.120,00	87.641.571.181,00	85.471.883.578,00	78.256.098.854,00	84.083.893.267,00	92,82%
5	'024	863.694.968.000,00	403.414.129.453,00	21.594.628.987,00	21.445.399.751,00	20.190.569.374,00	397.050.240.435,00	54,03%
6	'012	569.353.751.000,00	333.787.288.171,00	30.551.525.948,00	30.354.772.448,00	31.787.879.847,00	142.872.284.586,00	74,91%
7	'022	411.158.633.000,00	187.269.803.947,00	58.870.109.591,00	56.748.809.907,00	48.678.133.045,00	59.591.776.510,00	85,51%
8	'076	365.966.994.000,00	296.796.854.091,00	12.647.379.860,00	12.945.462.846,00	18.130.361.954,00	25.446.935.249,00	93,05%
9	'018	308.487.062.000,00	120.911.899.304,00	20.119.115.315,00	48.253.303.960,00	52.010.183.977,00	67.192.559.444,00	78,22%
10	'005	203.835.499.000,00	126.688.233.776,00	18.173.777.222,00	18.385.333.901,00	17.687.998.092,00	22.900.156.009,00	88,77%
11	'115	196.515.488.000,00	115.459.590.662,00	18.387.747.748,00	18.387.747.748,00	18.207.299.956,00	26.073.101.886,00	86,73%
12	'019	187.853.586.000,00	82.277.590.595,00	18.124.049.563,00	19.714.323.387,00	40.137.141.461,00	27.600.480.994,00	85,31%
13	'056	167.840.591.000,00	83.271.111.420,00	21.250.566.887,00	18.966.505.377,00	14.357.188.755,00	29.995.218.561,00	82,13%
14	'026	163.885.064.000,00	86.049.831.094,00	24.685.192.398,00	14.850.178.967,00	6.211.559.353,00	32.088.302.188,00	80,42%
15	'006	137.646.532.000,00	94.269.565.749,00	11.803.211.031,00	12.003.324.330,00	11.143.070.823,00	8.427.360.067,00	93,88%
16	'013	136.453.690.000,00	98.173.176.942,00	9.254.339.541,00	8.737.938.622,00	8.962.873.075,00	11.325.361.820,00	91,70%
17	'054	116.513.465.000,00	79.230.809.500,00	10.678.618.531,00	10.086.219.778,00	8.712.434.067,00	7.805.383.124,00	93,30%
18	'023	115.188.777.000,00	45.479.246.039,00	18.697.597.564,00	20.034.182.109,00	13.799.126.189,00	17.178.625.099,00	85,09%
19	'015	110.265.908.000,00	69.498.363.174,00	9.682.393.801,00	9.871.981.696,00	9.279.063.880,00	11.934.105.449,00	89,18%
20	'068	94.388.242.000,00	55.857.870.173,00	10.438.278.910,00	10.349.302.025,00	9.032.751.453,00	8.710.039.439,00	90,77%
	Sisa K/L	610.460.580.000,00	339.086.207.570,00	70.020.334.083,00	58.033.552.385,00	49.022.026.365,00	94.298.459.597,00	84,55%

Berdasarkan analisis proyeksi penyerapan anggaran belanja triwulan IV disimpulkan bahwa Kementerian PUPR (BA 033) menjadi K/L dengan sumbangan sisa pagu terbesar (*undisbursed* tertinggi) dan Kementerian Kesehatan menjadi K/L dengan rasio penyerapan terendah (54,03%). Angka proyeksi tersebut bisa menjadi dasar Ditjen Perbendaharaan secara umum dan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan monitoring lebih lanjut untuk memastikan terlaksananya pelaksanaan anggaran TA 2019 dengan baik.

Pagu Minus

Pagu minus bisa terjadi karena karakteristik belanja pegawai, khususnya belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji bisa tetap dicairkan walaupun anggaran tidak mencukupi. Realisasi belanja pegawai secara total untuk lingkup Provinsi Sumatera Barat adalah Rp 3,23 triliun dengan alokasi pagu Rp 4,2 triliun (persentase penyerapan 77,01%). Secara total untuk

Provinsi Sumbar belunderapat pagu minus belanja pegawai, akan tetapi pada tingkat satker sampai dengan akhir TW III terdapat 66 satuan kerja yang pagu belanja akun 511x minus.

Kode BA	K/L	Jumlah Satker Pagu Minus
005	Mahkamah Agung	1
006	Kejaksaan Negeri	2
013	Kementerian Hukum & HAM	8
025	Kementerian Agama	45
060	Kepolisian RI	4
066	Badan Narkotika Nasional	1
015	Kementerian Keuangan	5
Total		66

Jika dianalisis berdasarkan Kementerian dan Lembaga dan potensi pagu minus sampai dengan 31 Desember 2019, dapat ditemukan 20 K/L yang berpotensi mengalami minus pada belanja pegawai. Analisis berdasarkan K/L bertujuan untuk memberikan rekomendasi penambahan pagu belanja pegawai atau pergeseran belanja pegawai antar Kanwil sedangkan diluar 20 K/L yang berpotensi pagu minus tersebut masih bisa diselesaikan dengan mekanisme revisi DIPA pergeseran belanja pegawai antar satker dalam satu Kantor Wilayah.

BA	PAGU	REALISASI BELANJA 30 SEP 2019	PROYEKSI REALISASI BELANJA 31 DES 2019	POTENSI MINUS
104	822.057.000,00	690.999.167,00	879.453.485,27	(57.396.485,27)
117	6.739.032.000,00	5.653.066.504,00	7.194.811.914,18	(455.779.914,18)
'004	6.859.318.000,00	5.778.113.532,00	7.353.962.677,09	(494.644.677,09)
'006	64.818.603.000,00	55.769.461.698,00	70.979.314.888,36	(6.160.711.888,36)
'010	6.702.737.000,00	5.514.034.370,00	7.017.861.925,45	(315.124.925,45)
'013	65.250.742.000,00	60.676.850.971,00	77.225.083.054,00	(11.974.341.054,00)
'015	36.337.742.000,00	35.045.944.287,00	44.603.929.092,55	(8.266.187.092,55)
'019	22.326.369.000,00	19.284.760.753,00	24.544.240.958,36	(2.217.871.958,36)
'024	139.100.855.000,00	110.155.059.020,00	140.197.347.843,64	(1.096.492.843,64)
'026	3.472.550.000,00	2.887.974.541,00	3.675.603.961,27	(203.053.961,27)
'027	2.795.217.000,00	2.431.352.796,00	3.094.449.013,09	(299.232.013,09)
'033	24.691.923.000,00	19.563.026.432,00	24.898.397.277,09	(206.474.277,09)
'042	607.691.917.000,00	483.593.997.759,00	615.483.269.875,09	(7.791.352.875,09)
'056	29.341.442.000,00	23.474.621.709,00	29.876.791.266,00	(535.349.266,00)
'059	1.507.635.000,00	1.296.438.866,00	1.650.013.102,18	(142.378.102,18)
'060	692.557.198.000,00	610.560.923.610,00	777.077.539.140,00	(84.520.341.140,00)
'063	7.001.451.000,00	6.243.452.290,00	7.946.212.005,45	(944.761.005,45)
'066	1.711.279.000,00	2.024.523.961,00	2.576.666.859,45	(865.387.859,45)
'082	1.175.432.000,00	1.071.065.960,00	1.363.174.858,18	(187.742.858,18)
'089	7.711.331.000,00	6.468.563.377,00	8.232.717.025,27	(521.386.025,27)

5. Reviu Outstanding Kontrak

Sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019, data OMSPAN menunjukkan sebanyak 6.056 kontrak telah didaftarkan pada 6 KPPN yang ada di Sumatera Barat. Nilai pagu kontrak secara keseluruhan mencapai Rp3,475 triliun dengan nilai yang sudah terealisasi mencapai Rp1,648 triliun atau sekitar 47,42%. Dengan capaian realisasi kontrak tersebut, nilai outstanding kontrak sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 mencapai Rp1,827 triliun.

Jenis Belanja	Pagu Kontrak	Realisasi Kontrak	Outstanding	% Pagu Thd Pagu Keseluruhan
52	1,016,680,079,290	552,886,333,343	463,793,745,947	29.25%
53	2,455,645,669,886	1,093,029,383,165	1,362,616,286,721	70.66%
57	3,089,322,000	2,289,942,000	799,380,000	0.09%
Total	3,475,415,071,176	1,648,205,658,508	1,827,209,412,668	100.00%

Apabila dilihat dari kode jenis belanjanya, Belanja modal (53) masih mendominasi nilai keseluruhan kontrak yang didaftarkan ke KPPN yang ada di Sumatera Barat. Total pagu kontrak dengan jenis belanja 53 mencapai lebih dari 70% dari keseluruhan nilai kontrak, sedangkan untuk jenis belanja barang mencapai lebih dari 29%. Dengan nilai pagu yang hampir mencapai 70% dari keseluruhan pagu kontrak yang ada, total realisasi baru mencapai 44,51% yang berarti nilai outstanding atau kontrak yang belum dicairkan melebihi dari 54% dari nilai kontrak yang didaftarkan.

Setelah dilakukan klusterisasi berdasarkan nilai kontrak, untuk Sumatera Barat, kontrak yang nilainya diantara 1 s.d. 10 Miliar memiliki pagu kontrak terbesar mencapai lebih dari Rp1,57 triliun, diikuti dengan kontrak yang nilainya di atas 10 miliar yang mencapai 957 miliar. Untuk kontrak yang nilainya s.d. 50 juta, tercatat secara total hanya sebesar Rp26,73 miliar. Nilai outstanding atau nilai kontrak yang belum diserap juga linear dengan pagu kontrak berdasarkan klaster, dimana untuk kontrak-kontrak dengan nilai 1 s.d 10 miliar, total outstanding kontak s.d. 2 Oktober 2019 mencapai Rp784 miliar, diikuti dengan outstanding kontrak untuk kontrak-kontrak yang nilainya di atas 10 miliar dengan nilai outstanding mencapai Rp665,74 miliar. Total pagu kontrak, realisasi serta outstanding kontrak berdasarkan klusterisasi kontrak dapat dilihat secara detil pada tabel di bawah.

Klusterisasi Daftar Kontrak yang Didaftarkan s.d. 2 Oktober 2019

Kluster	NILAI KONTRAK	REALISASI KONTRAK	% REALISASI	OUTSTANDING
JANUARI	26,240,386,479	26,160,814,819	99.7%	79,571,660
>1 sd 10 M	16,894,693,287	16,894,693,287	100.0%	-
>10 M			0.0%	-
>200 Jt sd 1 M	2,480,600,564	2,480,600,564	100.0%	-
>50 sd 200 Jt	6,570,252,522	6,536,087,862	99.5%	34,164,660
sd 50 Jt	294,840,106	249,433,106	84.6%	45,407,000
FEBRUARI	102,281,846,350	101,909,204,502	99.6%	372,641,848
>1 sd 10 M	41,077,962,760	41,055,996,360	99.9%	21,966,400
>10 M	28,848,069,662	28,848,069,662	100.0%	-
>200 Jt sd 1 M	12,870,483,947	12,805,202,714	99.5%	65,281,233
>50 sd 200 Jt	18,088,935,566	17,850,261,351	98.7%	238,674,215
sd 50 Jt	1,396,394,415	1,349,674,415	96.7%	46,720,000
MARET	201,523,254,204	198,396,948,466	98.4%	3,126,305,738
>1 sd 10 M	65,122,870,625	62,493,913,225	96.0%	2,628,957,400
>10 M	64,444,180,078	64,444,180,078	100.0%	-
>200 Jt sd 1 M	39,116,465,790	39,042,337,450	99.8%	74,128,340
>50 sd 200 Jt	30,915,316,594	30,547,135,283	98.8%	368,181,311
sd 50 Jt	1,924,421,117	1,869,382,430	97.1%	55,038,687
APRIL	172,785,386,152	162,456,405,859	94.0%	10,328,980,293
>1 sd 10 M	73,039,321,163	64,156,810,750	87.8%	8,882,510,413
>10 M	25,186,685,208	25,186,685,208	100.0%	-
>200 Jt sd 1 M	35,173,442,565	34,543,076,875	98.2%	630,365,690
>50 sd 200 Jt	37,588,673,196	36,818,773,131	98.0%	769,900,065
sd 50 Jt	1,797,264,020	1,751,059,895	97.4%	46,204,125
MEI	267,949,257,275	260,943,199,367	97.4%	7,006,057,908
>1 sd 10 M	113,297,626,967	111,424,188,967	98.3%	1,873,438,000
>10 M	73,629,212,910	73,629,212,910	100.0%	-
>200 Jt sd 1 M	44,759,414,795	40,846,614,366	91.3%	3,912,800,429
>50 sd 200 Jt	33,906,106,737	32,826,329,071	96.8%	1,079,777,666

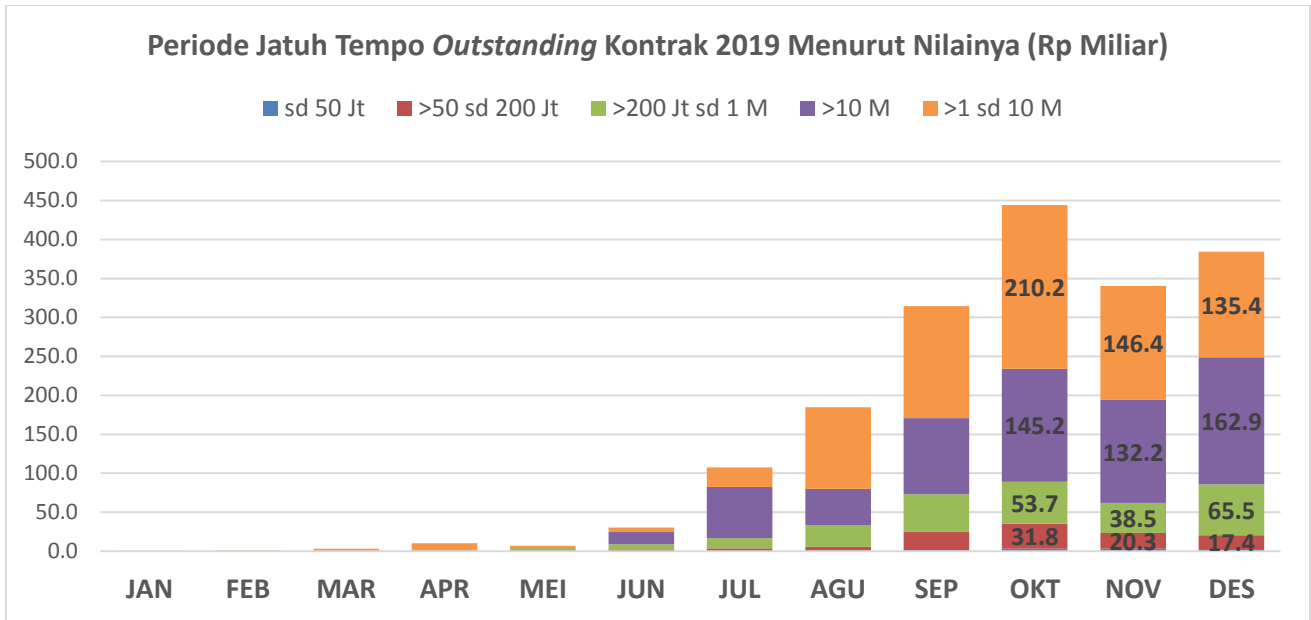
FLASH REPORT RPA TRIWULAN III TA 2019

sd 50 Jt	2,356,895,866	2,216,854,053	94.1%	140,041,813
JUNI	203,118,715,581	172,867,488,050	85.1%	30,251,227,531
>1 sd 10 M	102,785,320,183	97,006,692,983	94.4%	5,778,627,200
>10 M	15,542,916,331	-	0.0%	15,542,916,331
>200 Jt sd 1 M	56,319,953,590	49,090,182,860	87.2%	7,229,770,730
>50 sd 200 Jt	26,830,228,408	25,324,039,212	94.4%	1,506,189,196
sd 50 Jt	1,640,297,069	1,446,572,995	88.2%	193,724,074
JULI	329,787,097,166	222,248,265,445	67.4%	107,538,831,721
>1 sd 10 M	164,748,851,984	139,922,971,621	84.9%	24,825,880,363
>10 M	78,941,672,011	13,248,228,000	16.8%	65,693,444,011
>200 Jt sd 1 M	52,043,140,712	38,778,119,469	74.5%	13,265,021,243
>50 sd 200 Jt	31,645,700,620	28,272,322,519	89.3%	3,373,378,101
sd 50 Jt	2,407,731,839	2,026,623,836	84.2%	381,108,003
AGUSTUS	468,311,982,795	283,551,537,805	60.5%	184,760,444,990
>1 sd 10 M	267,985,009,973	163,349,816,754	61.0%	104,635,193,219
>10 M	73,932,920,726	27,571,712,765	37.3%	46,361,207,961
>200 Jt sd 1 M	75,336,527,381	47,379,565,227	62.9%	27,956,962,154
>50 sd 200 Jt	48,405,238,405	43,256,244,769	89.4%	5,148,993,636
sd 50 Jt	2,652,286,310	1,994,198,290	75.2%	658,088,020
SEPTEMBER	452,411,352,450	137,646,431,650	30.4%	314,764,920,800
>1 sd 10 M	216,625,582,228	72,850,601,485	33.6%	143,774,980,743
>10 M	114,218,919,629	16,422,731,498	14.4%	97,796,188,131
>200 Jt sd 1 M	71,846,195,554	23,337,179,906	32.5%	48,509,015,648
>50 sd 200 Jt	47,233,089,111	23,835,020,341	50.5%	23,398,068,770
sd 50 Jt	2,487,565,928	1,200,898,420	48.3%	1,286,667,508
OKTOBER	489,426,012,020	45,108,761,372	9.2%	444,317,250,648
>1 sd 10 M	228,213,826,088	18,047,871,706	7.9%	210,165,954,382
>10 M	160,873,927,724	15,627,682,469	9.7%	145,246,245,255
>200 Jt sd 1 M	58,905,906,445	5,237,325,493	8.9%	53,668,580,952
>50 sd 200 Jt	37,868,978,703	6,020,834,494	15.9%	31,848,144,209
sd 50 Jt	3,563,373,060	175,047,210	4.9%	3,388,325,850
NOVEMBER	374,297,848,371	33,884,111,922	9.1%	340,413,736,449

>1 sd 10 M	147,650,611,469	1,285,981,676	0.9%	146,364,629,793
>10 M	159,150,637,132	26,985,979,724	17.0%	132,164,657,408
>200 Jt sd 1 M	43,424,714,886	4,947,216,927	11.4%	38,477,497,959
>50 sd 200 Jt	20,959,156,286	652,064,345	3.1%	20,307,091,941
sd 50 Jt	3,112,728,598	12,869,250	0.4%	3,099,859,348
DESEMBER	387,281,932,333	3,032,489,251	0.8%	384,249,443,082
>1 sd 10 M	135,809,218,583	455,388,130	0.3%	135,353,830,453
>10 M	162,940,914,609	-	0.0%	162,940,914,609
>200 Jt sd 1 M	67,985,832,773	2,474,035,301	3.6%	65,511,797,472
>50 sd 200 Jt	17,449,218,373	58,305,500	0.3%	17,390,912,873
sd 50 Jt	3,096,747,995	44,760,320	1.4%	3,051,987,675
JUMLAH SELURUHNYA	3,475,415,071,176	1,648,205,658,508	47.4%	1,827,209,412,6 68
>1 sd 10 M	1,573,250,895,310	788,944,926,944	50.1%	784,305,968,366
>10 M	957,710,056,020	291,964,482,314	30.5%	665,745,573,706
>200 Jt sd 1 M	560,262,679,002	300,961,457,152	53.7%	259,301,221,850
>50 sd 200 Jt	357,460,894,521	251,997,417,878	70.5%	105,463,476,643
sd 50 Jt	26,730,546,323	14,337,374,220	53.6%	12,393,172,103

Sumber : OMSPAN, diolah

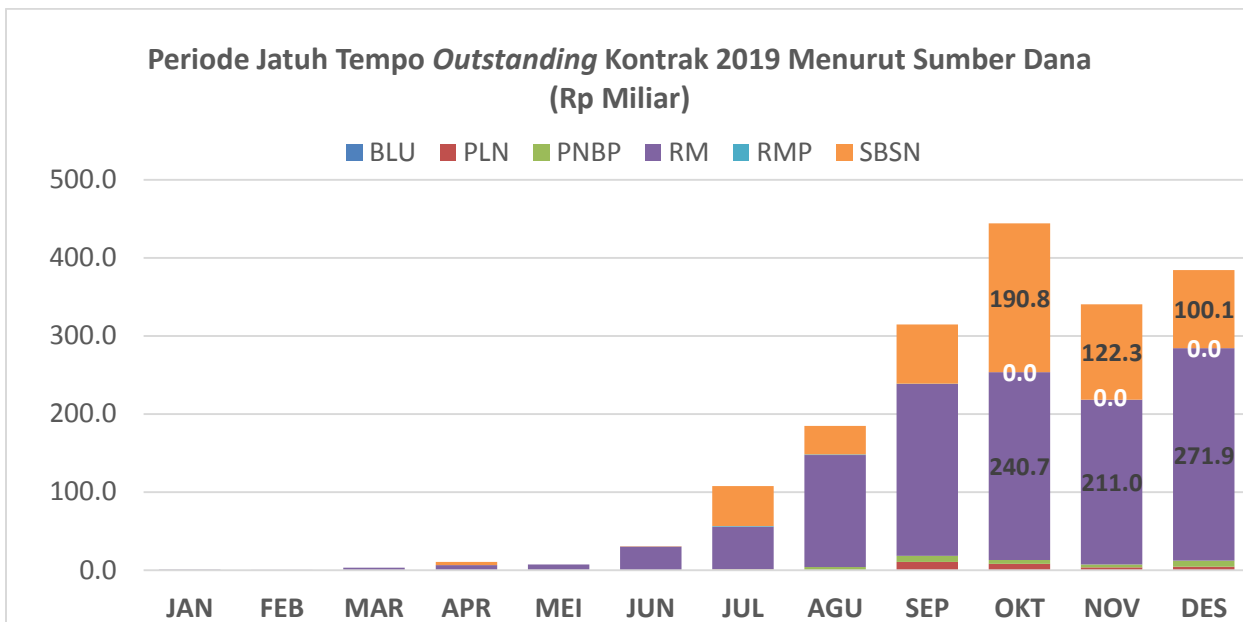
Setelah dilakukan klasterisasi, diketahui bahwa nilai outstanding kontrak yang jatuh tempo pada bulan Oktober, November dan Desember mencapai Rp1,168 triliun atau mencapai 63,97% dari total outstanding kontrak yang sebesar Rp1,827 triliun. Hal ini menandakan bahwa untuk periode triwulan IV TA 2019 masih akan menjadi periode dimana pencairan kontrak pekerjaan mencapai puncaknya khususnya di bulan November dan Desember 2019. Bahkan apabila dibandingkan dengan nilai seluruh kontrak yang didaftarkan s.d. bulan Oktober 2019, nilai outstanding kontrak pada triwulan IV 2019 bisa mencapai lebih dari 33% dari keseluruhan kontrak, hal ini berarti pada akhir tahun anggaran masih akan terlihat penumpukan SPM kontraktual yang diajukan oleh satker-satker yang ada di Sumatera Barat.



Sumber : OMSPAN, diolah

Terlihat dari grafik di atas, kontrak-kontrak dengan pagu di atas 1 miliar s.d. 10 miliar dan kontrak dengan pagu di atas 10 miliar, terlihat memiliki pagu outstanding terbesar untuk periode bulan Oktober s.d. Desember 2019.

Apabila dilihat dari sumber dana nya sebagaimana terlihat dari grafik di bawah, maka untuk periode triwulan IV TA 2019, nilai outstanding kontrak masih didominasi oleh kontrak dengan sumber dana RM dan SBSN.



Sumber : OMSPAN, diolah

6. Output Strategis Pendidikan

Output Prioritas Nasional Pertama untuk tema pendidikan pada TA 2019 mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp1,58 triliun dengan tingkat penyerapan s.d. 30 September 2019 mencapai 55,11% atau telah terserap sebesar Rp874,48 miliar. Secara agregat, tingkat penyerapan belum mencapai tingkat penyerapan ideal yaitu sebesar 60%.

Pagu dan Realisasi Output PN Tema Pendidikan s.d. 11 Oktober 2019

Kode BA	Pagu	Realisasi	% Real	% Pagu thd Pagu total
'023	10,150,302,000	5,375,053,177	52.95%	0.64%
'025	1,334,865,022,000	854,783,138,713	64.04%	84.12%
'033	224,114,437,000	5,235,932,290	2.34%	14.12%
'042	17,733,849,000	9,095,051,094	51.29%	1.12%
Total	1,586,863,610,000	874,489,175,274	55.11%	100.00%

Sumber : OMSPAN, diolah

Pagu sebesar Rp1,58 triliun tersebut, diampu oleh satker-satker yang berada di bawah 4 K/L yang ada di Sumatera Barat yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kode BA 023), Kementerian Agama (BA 025), Kementerian PUPR (BA 033) dan Kementerian RistekDikti (BA 042). Secara proporsi, satker-satker di bawah Kementerian Agama mendapatkan pagu terbesar, yaitu mencapai Rp1,33 triliun atau mencapai 84,12 persen dari pagu output PN tema Pendidikan secara keseluruhan. Dengan menyandang status pemilik pagu terbesar untuk output pendidikan, satker-satker dari Kementerian Agama juga tercatat memiliki tingkat penyerapan paling baik, dimana tingkat penyerapan s.d. 30 September 2019 telah melebihi 60 persen dari pagu yang ada. Secara lengkap persentase penyerapan output PN tema pendidikan dapat dilihat pada tabel di atas.

Capaian Output Penting pada tema Pendidikan

No	Output Prioritas	Pagu	Realisasi	% Real	Satuan	Target	Real Cap	% Capaian
1	'Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	3,884,000,000	3,093,210,500	79.64%	Orang	136	105	77.21%
2	'Guru Non - PNS penerima Tunjangan Insentif	14,430,000,000	5,457,049,000	37.82%	Guru	4810	2005	41.68%
3	'Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	1,944,000,000	1,104,300,000	56.81%	Guru	120	72	60.00%
4	'Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	41,458,000,000	20,478,142,125	49.39%	Guru	1688	850	50.36%
5	'Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	7,879,758,000	3,264,887,200	41.43%	Guru	304	134	44.08%
6	'PTKIN Penerima BOPTN	31,209,779,000	15,240,883,704	48.83%	Lembaga	30	16	53.33%
7	'PTN Yang Direvitalisasi Sarana dan Prasarana	16,933,849,000	8,699,852,065	51.38%	PTN	1	0	0.00%
8	'Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	2,117,600,000	1,565,392,000	73.92%	Santri	2177	1650	75.79%
9	Siswa MA, MTS dan MIN penerima BOS	125,699,400,000	101,703,682,884	80.91%	Siswa	119150	96000	80.57%

Sumber : OMSPAN, SMART DJA, diolah

Secara umum pelaksanaan output PN pada tema pendidikan tidak terlalu mengalami kendala yang berarti. Hal yang mungkin perlu diperhatikan adalah terkait pelaksanaan BOS pada satker-satker Kementerian Agama. Kendala terkait pelaksanaan BOS masih didominasi masalah keterbatasan SDM baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kompetensinya. Kemudian ada sedikit perubahan juknis BOS 2019, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya di lapangan. Meskipun demikian, beberapa kendala pelaksanaan dapat diatasi melalui proses monev yang secara rutin dilaksanakan oleh tim Kanwil Kementerian Agama dan Kantor Kemenag Kab/Kota. Hal ini secara langsung berpengaruh positif terhadap penyerapan pagu yang baik.

7. Output Strategi Kesehatan

Output prioritas Nasional dengan tema kesehatan mendapatkan pagu sebesar Rp41,9 miliar dengan tingkat penyerapan s.d. 30 September 2019 mencapai 44,92% atau terserap sebesar Rp 44,92%. Secara agregat, tingkat penyerapan belum mencapai tingkat penyerapan ideal yaitu sebesar 60%.

Pagu dan Realisasi Output PN Tema Kesehatan s.d. 11 Oktober 2019

Kode BA	Pagu	Realisasi	% Real	% Pagu thd Pagu total
'024	7,162,121,000	5,004,228,670	69.87%	17.09%
'025	2,662,400,000	1,734,548,750	65.15%	6.35%
'063	20,661,587,000	9,113,068,526	44.11%	49.30%
'068	11,423,083,000	2,975,193,391	26.05%	27.26%
Total	41,909,191,000	18,827,039,337	44.92%	100.00%

Sumber : OMSPAN, diolah

Pagu sebesar Rp41,90 miliar tersebut, diampu oleh satker-satker yang berada di bawah 4 K/L yang ada di Sumatera Barat yaitu Kementerian Kesehatan (Kode BA 024), Kementerian Agama (BA 025), Badan POM (BA 063) dan BKKBN (BA 068). Secara proporsi, satker-satker di bawah Badan POM mendapatkan pagu terbesar, yaitu mencapai Rp20,66 miliar atau mencapai 49,30 persen dari pagu output PN tema kesehatan secara keseluruhan. Adapun K/L dengan tingkat penyerapan paling tinggi dicatat oleh satker-satker dari Kementerian Kesehatan dengan tingkat penyerapan mencapai 69,87% atau sudah melewati target penyerapan pada triwulan III. Selain itu, pagu secara agregat di satker-satker Kementerian Agama tercatat juga telah terserap di atas target penyerapan triwulan III tepatnya di angka 65,15%. Secara lengkap persentase penyerapan output PN tema kesehatan dapat dilihat pada tabel di atas.

Capaian Output Penting pada tema Kesehatan

No	Output Prioritas	Pagu	Realisasi	% Real	Satuan	Target	Real Cap	% Capaian
1	'Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi	700,870,000	584,112,000	83.34%	Dokumen	1	1	100.00%
2	'Deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	1,443,395,000	809,501,920	56.08%	Layanan	2	1	50.00%
3	'Layanan Capaian Eliminasi Malaria	437,500,000	279,794,600	63.95%	Layanan	335	230	68.66%
4	'Layanan Imunisasi	648,974,000	595,375,000	91.74%	Layanan	19	19	100.00%
5	'Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	255,556,000	230,992,650	90.39%	Layanan	6	6	100.00%
6	'Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan	470,000,000	262,054,000	55.76%	Layanan	3	2	66.67%
7	'Layanan Pengendalian Penyakit TBC	364,570,000	248,071,000	68.04%	layanan	7	5	71.43%
8	'Pelatihan Strategis Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,639,870,000	1,352,821,500	82.50%	Orang	440	440	100.00%
9	'Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	1,140,000,000	715,950,000	62.80%	keluarga	37992	30000	78.96%
10	'Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	8,327,174,000	830,146,448	9.97%	Faskes	441	150	34.01%

Sumber : OMSPAN, SMART DJA, diolah

Kendala pencapaian output dengan tema kesehatan utamanya ada pada satker Perwakilan BKKBN Sumbar yang memiliki output 'Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes. Dengan pagu mencapai Rp8,32 miliar, tercatat tingkat penyerapan hanya berada pada level 9,97 persen atau baru terserap sebesar Rp830,14 juta rupiah. Alokasi anggaran untuk output ini dikhususkan untuk pemberian bantuan berupa alat kontrasepsi yaitu kondom, IUD dan KB Implan ke 441 faskes di 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Rendahnya tingkat penyerapan disebabkan karena pengadaan IUD yang memiliki pagu terbesar pada output ini terkendala pada proses pengadaan dimana penyedia IUD untuk wilayah Provinsi Sumbar tidak tersedia pada sistem e-catalog LKPP. Proses pengadaan langsung juga belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya petunjuk dari BKKBN pusat yang mensyaratkan pengadaan alokasi tersebut diadakan lewat e-catalog. Saat ini pihak BKKBN pusat dan LKPP sedang bekerjasama dalam membuat e-catalog sektoral sehingga nantinya diharapkan agar IUD dapat muncul pada sistem e-catalog tersebut.

8. Output Strategis Pengentasan Kemiskinan.

Output Prioritas Nasional Pertama untuk tema pengentasan kemiskinan pada TA 2019 mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp5,63 miliar dengan tingkat penyerapan s.d. 30 September 2019 mencapai 47,81% atau telah terserap sebesar Rp269,62 miliar. Secara agregat, tingkat penyerapan belum mencapai tingkat penyerapan ideal yaitu sebesar 60%.

Pagu dan Realisasi Output PN Tema Pengentasan Kemiskinan s.d. 11 Oktober 2019

Kode BA	Pagu	Realisasi	% Real	% Pagu thd Pagu total
'025	18,805,250,000	11,282,700,000	60.00%	3.33%
'026	196,634,000	190,645,500	96.95%	0.03%
'027	3,832,950,000	3,047,623,600	79.51%	0.68%
'029	1,944,600,000	793,005,400	40.78%	0.34%
'032	57,750,000	16,250,000	28.14%	0.01%
'033	491,892,517,000	233,152,973,459	47.40%	87.22%
'056	47,103,746,000	21,070,266,943	44.73%	8.35%
'067	141,490,000	75,714,000	53.51%	0.03%
Total	563,974,937,000	269,629,178,902	47.81%	100.00%

Sumber : OMSPAN, diolah

Pagu sebesar Rp563,97 miliar tersebut, diampu oleh satker-satker yang berada di bawah 8 K/L yang ada di Sumatera Barat. Secara proporsi, satker-satker di bawah Kementerian PUPR (BA 033) mendapatkan pagu terbesar, yaitu mencapai Rp491,89 miliar atau mencapai 87,22 persen dari pagu output PN tema pengentasan kemiskinan secara keseluruhan. Adapun K/L dengan tingkat penyerapan paling tinggi dicatat oleh satker-satker dari Kementerian Sosial (BA 027) dengan tingkat penyerapan mencapai 79,51% atau sudah jauh melewati target penyerapan pada triwulan III. Secara lengkap persentase penyerapan output PN tema pengentasan kemiskinan dapat dilihat pada tabel di atas.

Capaian Output Penting pada tema Pengentasan Kemiskinan

No	Output Prioritas	Pagu	Realisasi	% Real	Satuan	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
1	'Bidik Misi PTKI	17,688,000,000	10,926,000,000	61.77%	Orang	1723	1200	69.65%
2	'Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	165,909,000,000	111,174,757,394	67.01%	Unit	8686	5900	67.93%
3	'Infrastruktur Berbasis Masyarakat	36,932,937,000	18,822,819,400	50.96%	Kelurahan	356	178	50.00%
4	'Pembangunan Rumah Khusus	15,154,558,000	3,482,175,064	22.98%	Unit	90	30	33.33%
5	'Pembangunan Rumah Susun	41,998,000,000	7,939,024,310	18.90%	unit	84	19	22.62%
6	Reforma Agraria	42,099,608,000	19,612,916,543	46.59%	Bidang	163653	87000	53.16%
7	'Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP	1,117,250,000	356,700,000	31.93%	Santri	1317	500	37.97%
8	'Sistem Pengelolaan Air Limbah	46,276,000,000	18,024,500,000	38.95%	KK	5620	2350	41.81%
9	'SPAM Berbasis Masyarakat	92,436,988,000	34,242,505,283	37.04%	Kawasan	4	2	50.00%

Sumber : OMSPAN, SMART DJA, diolah

Adapun permasalahan dalam pencapaian target volume pada output PN tema pengentasan kemiskinan, utamanya yang terdapat pada satker Kementerian PUPR dan BPN dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Nama K/L Leading Sector	Output PN	Penjelasan Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kementerian PUPR	Pembangunan Rumah Khusus	Output Pembangunan Rumah Khusus pada Kementerian PUPR mendapatkan alokasi dana sebesar Rp15,15 miliar dengan volume output 90 unit rumah khusus untuk masyarakat miskin yang ada di 4 Kabupaten/Kota. Sampai dengan 11 Oktober 2019, tingkat penyerapan ada pada level 22,98%. Hal ini dikarenakan proses pengadaan barang untuk fisik bangunan baru dilakukan pada bulan Juni 2019. Adanya tambahan beberapa paket lelang pengadaan baru di luar dari rencana semula ditenggarai sebagai penyebab keterlambatan proses pengadaan. Selain itu transisi perubahan ULP menjadi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) pada Kementerian PUPR, juga berpengaruh terhadap eksekusi lelang yang semula direncanakan untuk dilakukan lebih cepat.
		Pembangunan Rumah Susun	Output Pembangunan Rumah Susun mendapatkan alokasi pagu dana sebesar Rp41,99 miliar dengan tingkat penyerapan 18,90%. Pagu tersebut diperuntukan dalam pembangunan rumah susun pada 6 lokasi dengan target 84 unit. Tingkat penyerapan yang rendah juga diakibatkan proses pengadaan barang yang terlambat. Pada saat dilakukan EPA triwulan 2, baru 3 paket yang berhasil dikontraskan dari 6 paket secara keseluruhan. Selain itu transisi perubahan ULP menjadi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) pada Kementerian PUPR, juga berpengaruh terhadap eksekusi lelang yang semula direncanakan untuk dilakukan lebih cepat.

		Sistem Pengelolaan Air Limbah dan 'SPAM Berbasis Masyarakat	Output Sistem Pengelolaan Air Limbah dan 'SPAM Berbasis Masyarakat dilaksanakan oleh beberapa satker di Kementerian PUPR. Kendala pada output ini adalah terlambatnya DIPA satker diterima. Hasil EPA triwulan II dan III menemukan fakta bahwa DIPA seluruh satker pelaksana output ini baru diterima pada bulan Juni-Juli 2019. Hal ini mengkonfirmasi kenapa kegiatan pada DIPA satker tersebut pada akhir semester 1 kemarin belum memiliki penyerapan sama sekali. Meskipun demikian, sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019, tingkat penyerapan pada kedua output tersebut tercatat sudah mencapai 38,95% dan 37,04%.
2.	Kementerian ATR/BPN	Peta Bidang Tanah dan Redistribusi Tanah	Output yang dikategorikan sebagai Reforma Agraria dilaksanakan oleh seluruh satker BPN yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Secara umum tingkat penyerapan secara agregat berada pada level 46,59% dari pagu yang ada. Permasalahan yang terjadi di Sumatera Barat dapat digeneralisasi untuk keseluruhan satker BPN yang ada karena berdasarkan konfirmasi yang dilakukan, satker-satker BPN Kab/Kota mengalami kendala yang serupa. Mayoritas masyarakat di Sumatera Barat belum berkenan untuk mendaftarkan tanahnya melalui kegiatan PTSL karena status tanah mayoritas merupakan kepemilikan bersama (komunal) dan disamping itu tidak adanya persetujuan dari Mamak Penghulu Adat/Mamak Kepala Waris. Selain itu kendala juga terjadi karena banyak bidang tanah yang dikuasai/dimiliki oleh orang-orang yang bertempat tinggal jauh dari letak tanah sehingga menyulitkan petugas PTSL dalam melakukan identifikasi pemilikan/penguasaan dan pemasangan tanda batas bidang tanah. Kendala yang juga seringkali ditemukan adalah Berkas fisik Peta Bidang Tanah (PBT) yang belum memiliki dokumen yuridis dan sebaliknya sehingga diperlukan waktu yang lebih lama dalam menetapkan kategori tanahnya.

9. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran

Tahun 2019 juga menjadi periode yang tepat untuk mengukur Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga, capaian IKPA Satker dan K/L tidak dapat dianggap sebelah mata. Peraturan tersebut menetapkan bahwa capaian IKPA dapat mempengaruhi pemberian insentif anggaran (dikombinasikan dengan capaian Evaluasi Kinerja Anggaran DJA) yang dapat dialokasikan kepada K/L. Dampaknya kesadaran (awareness) K/L dan satker terhadap capaian IKPA jauh meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berikut merupakan gambaran Nilai IKPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2019:

Tabel Perbandingan Capaian IKPA sampai dengan Triwulan III 2019

No	Indikator	Nilai Bobot IKPA		Nilai Bobot IKPA		Status
		Triwulanan Tahun 2018		Triwulanan Tahun 2019		
		Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan III	Semester I	
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran		97.275	95.96	90.64	89.95	Meningkat
1	Revisi DIPA	100	100	100	100	Tetap
2	Deviasi Halaman III DIPA	94.55	91.92	81.28	79.9	Meningkat
3	Pagu Minus	-	-	-	-	-
Kepatuhan Terhadap Regulasi		84.435	86.815	93.19	91.55	Meningkat
1	Pengelolaan UP	85	87	95	95	Tetap
2	LPJ Bendahara	81.74	85.26	96.76	95.2	Meningkat
3	Penyampaian Data Kontrak	71	75	81	76	Meningkat
4	Dispensasi SPM	100	100	100	100	Tetap
Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan		95.02	98.10	96.38	92.33	Meningkat
1	Penyelesaian Tagihan	91.48	94.67	93.19	92.37	Meningkat
2	Penyerapan Anggaran	93.95	100	96.4	85.05	Meningkat
3	Retur SP2D	99.62	99.62	99.56	99.57	Menurun
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		91.15	91.33	89.5	89.5	Tetap
1	Perencanaan Kas	87	87	99	99	Tetap
2	Pengembalian/kesalahan SPM	95.3	95.66	80	80	Tetap
IKPA Agregat		80.51	87.88	92.5	89.2	Meningkat

Sumber : Online Monitoring SPAN (diolah)

Pada Triwulan III TA 2019, beberapa capaian IKPA mengalami peningkatan serta penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

a. Penurunan Nilai IKPA Triwulan III TA 2018 dengan Nilai IKPA Triwulan III TA 2019:

1) Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran

Pada Trwiulan III TA 2019 nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA mengalami penurunan nilai IKPA dibandingkan dengan Triwulan III TA 2018 sebanyak 6.635 poin. Untuk revisi DIPA mendapatkan nilai yang konstan, sedangkan deviasi pada Halaman III DIPA mengalami penurunan nilai dari 95.55 menjadi 81.28. Terkait hal ini, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat bersama KPPN Padang telah memberikan surat himbauan kepada satker berupa surat pemberitahuan deviasi Halaman III DIPA satkker. Namun dikarenakan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan satker, masih banyak satker yang tidak mengajukan revisi deviasi Halaman III DIPA ke Kanwil.

2) Efisiensi pelaksanaan kegiatan

Pada Triwulan III TA 2019 Pengembalian/kesalahan SPM kembali mengalami penurunan nilai IKPA sebanyak 15.3 poin. Banyaknya jumlah SPM yang salah dan tertolak pada Triwulan III T A 2019 mengakibatkan penurunan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan ketelitian satkker terhadap pengajuan SPM.

b. Peningkatan Nilai IKPA Triwulan III TA 2018 dengan Nilai IKPA Triwulan III TA 2019:

1) **Kepatuhan Terhadap Regulasi**

LPJ Bendahara dan Penyampaian Data Kontrak meningkat pada Triwulan III TA 2019, kenaikan ini cukup signifikan. Jika sebelumnya pada Triwulan III TA 2018 LPJ Bendahara hanya berada pada nilai 81.74 poin, pada Triwulan III TA 2019 meningkat menjadi 96.76 poin. Penyampaian data kontrak juga mengalami peningkatan dari nilai sebelumnya hanya sebesar 71 poin, pada Triwulan III TA 2019 meningkat menjadi 81 poin.

2) **Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan**

Penyelesaian tagihan dan penyerapan anggaran pada Triwulan III TA 2019 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1.71 poin dan 2.45 poin. Namun pada retur SP2D mengalami penurunan sebesar 0.06 poin.

TABEL JUMLAH TRANSAKSI IKPA K/L TAHUN 2018 DAN 2019

No	Indikator	Triwulan III 2018	Triwulan III 2019	Selisih	% Naik/Turun
1	Jumlah Revisi	426	653	227	53.29%
2	Jumlah DIPA	730	692	(38)	-5.21%
3	Rata-rata Deviasi Halaman III DIPA per Bulan	4.60	20.10	16	336.96%
4	Jumlah SPM GUP Tepat Waktu	5,024	6,031	1,007	20.04%
5	Jumlah SPM GUP	5,676	6,330	654	11.52%
6	Jumlah LPJ Bendahara Tepat Waktu	11,080	12639	1,559	14.07%
7	Jumlah LPJ Bendahara disampaikan ke KPPN	14,760	13,707	(1,053)	-7.13%
8	Jumlah Data Kontrak Tepat Waktu	876	970	94	10.73%
9	Jumlah Data Kontrak disampaikan ke KPPN	1,315	1,319	4	0.30%
10	Jumlah SPM Kontraktual diselesaikan tepat waktu	1,479	1,622	143	9.67%
11	Jumlah SPM Kontraktual disampaikan ke KPPN	1,584	1,756	172	10.86%
12	Penyerapan Anggaran K/L *pagu APBN	Rp. 4.4 Triliun	Rp. 5.3 Triliun	Rp. 902.5 Milyar	20.54%
13	Jumlah Retur SP2D	442	1,559	1,117	252.71%

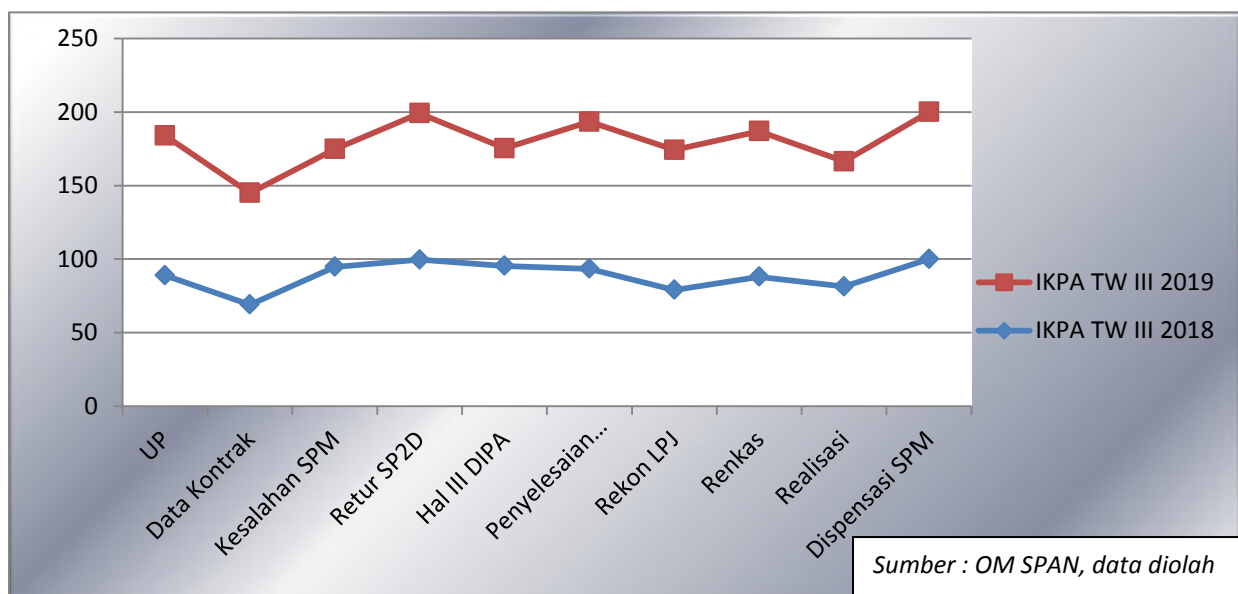
14	Jumlah SP2D diterbitkan KPPN	61,521	62,082	561	0.91%
15	Jumlah Renkas Tepat Waktu	433	532	99	22.86%
16	Jumlah Renkas disampaikan ke KPPN	433	532	99	22.86%
17	Jumlah SPM salah dikembalikan KPPN	3,841	3,352	-489	-12.73%
18	Jumlah SPM disampaikan ke KPPN	65,362	65,434	72	0.11%

Sumber : Online Monitoring SPAN (diolah)

Jumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Triwulan III TA 2018 sebanyak 730 satker, namun pada Triwulan III TA 2019 hanya sebanyak 692 satker. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya Dana Tugas Pembantuan (TP) oleh satker kedinasan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Serta terdapat beberapa satker Kementerian Agama yang melakukan konsolidasi satker. Penyampaian LPJ Bendahara juga menurun seiring dengan berkurangnya jumlah DIPA Satker.

Secara keseluruhan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Triwulan III TA 2018 jika dibandingkan dengan Triwulan III TA 2019 meningkat. Penyerapan anggaran belanja APBN di Sumatera Barat sampai dengan Triwulan III TA 2019 sebesar Rp. 5.3 Triliun hal ini meningkat dibandingkan Triwulan III TA 2018 hanya Rp. 4.4 Triliun. Pola penyerapan anggaran Semester I Tahun 2019 hampir sama dengan pola penyerapan anggaran tahun 2015-2018 dimana terdapat kenaikan penyerapan anggaran pada bulan April dan Juni. Perbedaan terdapat pada bulan Mei 2019 dimana terjadi pembayaran Tunjangan Hari Besar Keagamaan/ THR bagi PNS, anggota TNI/Polri, Pejabat Negara, penerima Pensiun, dan penerima Tunjangan.

Perbandingan IKPA Triwulan III TA 2018 dan Triwulan III TA 2019



Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tingkat wilayah di Sumatera Barat Triwulan III TA 2019 mencapai 89,24 atau mengalami kenaikan dari nilai IKPA Triwulan III TA 2018 yang mencapai 83,64. Kenaikan disumbangkan oleh Persentase Penyampaian LPJ Bendahara yang tepat waktu, kenaikan persentase penyampaian data kontrak secara tepat waktu, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, serta penurunan jumlah retur SP2D.

Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil RPA Semester I TA 2019

Permasalahan ditemukan Semester I	Rekomendasi	Tindak Lanjut Kanwil DJPB Prov. Sumbar	Progress
A. Permasalahan Perencanaan Penganggaran			
Blokir Belanja	-	-	-
Halaman III DIPA	PPK agar membuat rencana kegiatan dan rencana penarikan dana secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan riil satker.	Kanwil DJPB Prov. Sumbar akan melakukan FGD/Sosialisasi terkait Rencana Penarikan Dana pada satker dengan memperhatikan kebutuhan riil satker dalam Tahun Anggaran.	Selesai
Revisi	Mengoptimalkan koordinasi antara Unit Eselon I K/L dengan satuan kerja di bawahnya agar dalam penyusunan RKAKL sesuai dengan kebutuhan riil satker	Kanwil DJPB Prov. Sumbar telah memberikan masukan berupa FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) pada tanggal 20 Februari 2019, Rakorda IKPA, dll untuk menghimbau satker lingkup Sumatera Barat agar melakukan koordinasi yang baik mengenai penyusunan RKAKL yang sesuai dengan kebutuhan riil satker dengan Unit Eselon I masing-masing.	Selesai
B. Permasalahan Eksekusi : Pengadaan Barang dan Jasa			
Penyediaan Lahan	Permasalahan pengadaan tanah/pembebasan tanah masih sering terjadi di Sumatera Barat.	Kanwil DJPB Prov. Sumbar perlu menghimbau satker BPN agar mengoptimalkan kembali upaya Sosialisasi dan penyuluhan kepada Mamak Penghulu Suku/Ketua Kerapatan Adat Nagari dan Masyarakat Adatnya terhadap pentingnya penguatan hak masyarakat adat dalam kegiatan PTSL. Selain itu diharapkan ada sinergi yang kuat antara BPN, Pemerintah Daerah dan Unsur Masyarakat dan tokoh masyarakat Desa dalam bentuk satgas percepatan PTSL (Pendaftaran	Selesai

			Tanah Sistematis Lengkap) di setiap Kab/Kota yang diharapkan dapat mendukung suksesnya pelaksanaan program reforma agraria di Sumatera Barat.	
	Keterbatasan Vendor	Melakukan identifikasi terhadap pengadaan barang/ jasa yang belum tersedia dalam e-catalog	Terhadap masih berulangnya barang khusus yang tidak tercantum dalam e-catalog, Kanwil DJPB Prov. Sumbar perlu menyarankan kepada Kementerian Keuangan/ Ditjen Perbendaharaan bersama kementerian teknis agar berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).	Selesai
		Perlu dilakukan bimtek dan penyegaran secara rutin terhadap pejabat pengadaan dengan bekerjasama dengan LKPP	Kanwil DJPB Prov. Sumbar telah memberikan masukan terhadap satker Kementerian/Lembaga agar Pejabat Pengadaan diberikan bimtek yang bekerja sama dengan LKPP	Selesai
	Optimalisasi Lelang Pra DIPA	Ketepatan waktu pengadaan barang sebaiknya juga dijadikan sebagai indikator kinerja utama (KPI) dari Kepala Satker (KPA) dan atau PPK satker sehingga dapat memitigasi pelaksanaan lelang yang acapkali diindikasikan tertunda dengan kesengajaan.	Kanwil DJPB Prov. Sumbar memberikan masukan terhadap satker Kementerian/Lembaga agar Ketepatan waktu pengadaan barang sebaiknya juga dijadikan sebagai indikator kinerja utama (KPI) dari Kepala Satker (KPA) dan atau PPK satker.	Selesai
C.	Permasalahan Eksekusi : Peraturan dan Mekanisme			
	Penyusunan Juknis K/L	Unit Eselon I agar segera menerbitkan Juknis sebagai antisipasi apabila barang/ jasa yang diperlukan tidak terdapat dalam e-catalog	Kanwil DJPB Prov. Sumbar memberikan masukan terhadap satker Kementerian/Lembaga agar mendorong unit Eselon I masing-masing segera menerbitkan Juknis e-catalog	Selesai

		Unit eselon I agar menerbitkan juknis paling lambat awal Januari tahun anggaran berkenaan	Kanwil DJPB Prov. Sumbar memberikan masukan terhadap satker Kementerian/Lembaga agar menerbitkan juknis paling lambat awal Januari tahun anggaran berkenaan.	Selesai
Kebijakan internal Kementerian/Lembaga		KPA agar membuat SOP pertanggungjawaban pelaksana kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran terhadap pengeluaran yang menggunakan uang persediaan	Kanwil DJPB Prov. Sumbar memberikan masukan terhadap satker Kementerian/Lembaga agar KPA agar membuat SOP pertanggungjawaban pelaksana kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran terhadap pengeluaran yang menggunakan uang persediaan	Selesai
		Membentuk forum komunikasi antara satker, Pemda, dan lembaga adat untuk penggunaan tanah ulayat bagi proyek pemerintah	Kanwil DJPB Prov. Sumbar memberikan masukan terhadap satker Kementerian/Lembaga agar Membentuk forum komunikasi antara satker, Pemda, dan lembaga adat khususnya bagi satker BPN (Badan Pertanahan Nasional).	Selesai
Penetapan Pejabat Perbendaharaan	-	-	-	-
Mekanisme Pelaporan Data Kontrak	a. Bagi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan : Agar menyediakan sarana alternatif menyampaikan data kontrak melalui fitur upload data kontrak pada aplikasi SAS		Kanwil DJPB Prov. Sumbar telah memberikan masukan terhadap Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Agar menyediakan sarana alternatif menyampaikan data kontrak melalui fitur upload data kontrak pada aplikasi SAS melalui RPA Semester I TA 2019	Selesai
	b. Bagi KPPN : 1) agar dilakukan evaluasi terhadap kewenangan pemberian dispensasi data kontrak oleh Kepala KPPN. Diusulkan agar pemberian dispensasi data kontrak dinaikkan ke level Kepala Kanwil DJPb; 2) KPPN agar menyediakan sarana alternatif melalui email atau layanan berbasis		Kanwil DJPB Prov. Sumbar telah memberikan masukan kepada unit vertikal KPPN Lingkup Sumatera Barat agar pengusulan pemberian dispensasi data kontrak dinaikkan pada level Kanwil DJPB prov. Sumbar dan menyediakan sarana pengaduan melalui email terkait data kontrak.	Selesai

		online lainnya apabila tidak tersedia portal khusus yang disediakan Kantor Pusat DJPb		
		c. Bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan : Melakukan identifikasi terhadap satker yang memiliki alokasi anggaran belanja modal di atas Rp200 juta sehingga dapat lebih dini menghimbau satker agar segera menyampaikan data kontrak setelah kontrak ditandatangani	Kanwil Kanwil DJPB Prov. Sumbar telah mengadakan FGD terkait hal ini dan menyampaikan kepada satker Kementerian/Lembaga terkait.	Selesai
		d. Bagi Kementerian Negara/ Lembaga / Satker: Pimpinan satker agar membuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang matang, jadwal pengadaan barang/jasa, jadwal pencairan dana, dan monitoring evaluasi atas kegiatan yang telah dan akan datang	Kanwil Kanwil DJPB Prov. Sumbar telah mengadakan FGD terkait hal ini dan menyampaikan kepada satker Kementerian/Lembaga terkait.	Selesai
	Keterlambatan Penyelesaian Tagihan	Masih terdapat keterlambatan penyampaian data kontrak agar dilakukan evaluasi terhadap kewenangan pemberian dispensasi data kontrak oleh Kepala KPPN. Diusulkan agar pemberian dispensasi data kontrak dinaikkan ke level Kanwil DJPb.	Kanwil Kanwil DJPB Prov. Sumbar telah menghimbau KPPN Lingkup Provinsi Sumatera Barat agar pemberian dispensasi data kontrak dinaikkan ke level Kepala Kanwil DJPb	Selesai

		Terkait keterlambatan penyampaian data kontrak, KPPN agar menyediakan sarana alternatif melalui email atau layanan berbasis online lainnya apabila tidak tersedia portal khusus yang disediakan Kantor Pusat DJPb	Kanwil Kanwil DJPB Prov. Sumbar telah menghimbau KPPN Lingkup Provinsi Sumatera Barat agar membuat email/layanan berbasis online lainnya sebagai layanan konsultasi	Selesai
D.	Restrukturisasi Organisasi			
	Restrukturisasi	-	-	-
E.	Permasalahan Lain			
	SDM	SDM pelaksana pengadaan barang dan jasa kurang kompeten atau belum terdapat panitia/ pejabat pengadaan dan/ atau unit layanan pengadaan (ULP) yang berkompeten pada satker	anwil DJPB Prov. Sumbar telah memberikan masukan terhadap satker Kementerian/Lembaga agar Pejabat Pengadaan diberikan bimtek yang bekerja sama dengan LKPP	Selesai
	Kondisi Alam	-	-	-